

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika perubahan zaman menuntut adanya perubahan di berbagai lini kehidupan. Pendidikan sebagai agen perubahan tidak luput dari dinamika tersebut. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Mulai dari mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan sampai dengan pergantian kurikulum ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut pandangan yang lampau kurikulum memiliki pengertian kumpulan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik (Syaodih Sukmadinata, 2017: 4). Secara terminologi, pengertian kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli (Nurmadiyah, 2018: 43). Diantaranya : 1) Menurut Crow kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematis guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. 2) Menurut Arifin kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional Pendidikan. 3) Menurut Mac Donald kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar-mengajar.

Dari berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa kurikulum merupakan ruh dalam dunia pendidikan, artinya kurikulum menjadi hal yang sangat penting dan menjadi acuan baik buruknya pendidikan. Sebagai sebuah produk, tidaklah heran jika kurikulum seringkali berubah dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan perubahan zaman yang terjadi. Sebaik apapun kurikulum yang telah disusun, di masa mendatang tetap memerlukan berbagai penyempurnaan dan perubahan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, perjalanan dunia pendidikan mencatat tidak kurang sebanyak sebelas kali telah terjadi perubahan kurikulum. Mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Perubahan yang terjadi semata-mata merupakan

upaya untuk menyesuaikan tuntutan zaman yang telah mengalami perubahan sistem politik, sosial, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia selalu menjadi isu yang menarik, hal ini dikarenakan berbagai tanggapan yang sering terlontar yang mengatakan bahwa perubahan menteri akan selalu disertai perubahan kurikulum. Sebenarnya anggapan semacam ini tidak sepenuhnya salah, karena dalam sebuah perubahan kurikulum tentunya terdapat suatu tujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Yang terbaru adalah, Kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka pada awalnya diperkenalkan dengan istilah kurikulum darurat tujuan diberlakukannya kurikulum ini adalah sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan karena adanya pandemic Covid 19 di Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus. Inti dari kebijakan ini adalah adanya penyederhanaan kurikulum nasional.

Penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan mengurangi kompetensi dasar yang ada pada setiap mata pelajaran. Harapannya adalah siswa dan guru dapat fokus pada kompetensi inti untuk yang akan digunakan pada jenjang selanjutnya. Kebijakan ini ditempuh karena pada masa tersebut, siswa melakukan pembelajaran dari rumah. Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, pemerintah berharap guru melakukan assesmen diagnostic untuk memeriksa keadaan siswa baik non kognitif maupun kognitif selama menjalankan pembelajaran jarak jauh.

Anggraena et al., (2021:18) menjelaskan bahwa setelah berjalan kurang lebih satu tahun ajaran, Kemendikbud telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan kurikulum darurat. Hasil dari evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa siswa yang menggunakan kurikulum darurat memperoleh hasil penilaian yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang menggunakan kurikulum 2013. Pada tanggal 10 Desember 2019 Nadiem Makarim mengubah dan menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013.

Pelaksanaan kurikulum Kurikulum Merdeka di sekolah tidak dilaksanakan secara bersama-sama tetapi pemerintah memberikan sebuah kebijakan kepada

sekolah untuk memilih pelaksanaan kurikulum. Pada tahun pelajaran 2022/2023 ini sekolah di Indonesia pada umumnya dan khususnya sekolah Dasar di Kabupaten Kudus mulai mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Untuk kelas I dan Kelas IV.

Dalam proses transisi yang terjadi di lapangan, pergantian kurikulum 2013 menuju ke kurikulum Merdeka, pemerintah tidak memberikan pembekalan secara langsung kepada guru-guru di sekolah-sekolah khususnya jenjang Sekolah Dasar. Namun pembekalan yang diberikan pemerintah adalah dengan metode belajar mandiri melalui Platform Merdeka Mengajar. Cara ini mungkin dipandang sebagai sebuah inovasi baru yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang jadi permasalahan adalah keterbatasan Sumber Daya Guru yang beragam dalam pengoperasian teknologi apakah efektif untuk memberikan bekal berkaitan dengan penerapan kurikulum Merdeka.

Fenomena di lapangan, di tahun pertama diberlakukan kurikulum merdeka bagi kelas I dan IV, penulis menjumpai bahwa di Gugus Kaliyitno terdapat Sekolah yang berhasil mengantarkan salah satu siswanya yang duduk di kelas IV meraih prestasi di tingkat provinsi Jawa Tengah dan mewakili Jawa Tengah menjalani perlombaan di tingkat nasional. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik melakukan analisis berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi secara mendalam.

Ada berbagai model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program diantaranya adalah model Tyler, Stake, Alkin, dan CIPP.

Model evaluasi Tyler ditujukan untuk mengevaluasi tingkah laku siswadi dalam proses evaluasi model tyler mengamati tingkah laku siswa sebelum dan sesudah diberlakukan kurikulum. Model ini hanyamengukur hasil, tanpa memperhatikan prosesnya ketika berjalan.

Model Stake menekankan dua kegiatan yaitu *description* dan *judgement* serta membedakan menjadi tiga aspek dalam program pendidikan, yaitu *context*, *process* dan *outcomes*.

Model Alkin membagi aspek evaluasi ini atas tiga hal, yaitu masukan, proses atau perantara (*mediating*), dan keluaran (*hasil*). Namun model ini hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum yang sudah siap dilaksanakan.

Model CIPP mempunyai 4 aspek evaluasi yaitu context (konteks), input (masukan), process (proses), dan product (hasil). Model CIPP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pada program yang masih dalam pengembangan atau yang sudah selesai dilaksanakan. Model ini cocok digunakan untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka yang pelaksanaannya masih dalam tahap transisi yang dilaksanakan di kelas I dan IV.

Dengan kenyataan ini, peneliti tertarik untuk mengangkat judul Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar di Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe adapun dengan memilih 4 sekolah dasar yang memiliki keunikan dan prestasi yang representative untuk diteliti. Ke empat sekolah tersebut yaitu SD 1 Piji, SD 2 Piji, SD 3 Piji, dan SD 4 Piji. Alasan pemilihan tempat penelitian adalah di tahun pertama pemberlakuan kurikulum merdeka bagi guru kelas I dan IV, salah satu SD di Gugus Kaliyitno berhasil mengantarkan siswa kelas IV memperoleh prestasi di tingkat kabupaten, provinsi dan mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional. Selain itu alasan pemilihan subyek penelitian dikarenakan keunikan letak wilayah sekolah yang berdekatan dengan MI namun sekolah-sekolah ini dapat mempertahankan eksistensinya dalam melaksanakan pelayanan pendidikan di tengah-tengah masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi kurikulum merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023 di kelas I dan IV Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ditinjau dari aspek *Context*?
2. Bagaimanakah implementasi kurikulum merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023 di kelas I dan IV Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ditinjau dari aspek *Input*?
3. Bagaimanakah implementasi kurikulum merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023 di kelas I dan IV Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ditinjau dari aspek *Process*?

4. Bagaimanakah implementasi kurikulum merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023 di kelas I dan IV Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ditinjau dari aspek *Product*?

1.3 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023 di Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dengan menggunakan model Evaluasi CIPP dengan menganalisis secara mendalam pada aspek *Context, Input, Process, dan Product*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan implementasi kurikulum merdeka yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pengembangan dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan khususnya dalam pengimplementasian kurikulum merdeka.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka di gugus binaan dan pemanfaatan platform merdeka mengajar bagi guru kelas I dan kelas IV.

1.4.2.2 Bagi Sekolah

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi Implementasi kurikulum merdeka di sekolah.

1.4.2.3 Bagi Guru

Penelitian ini bermanfaat meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada implementasi kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022/2023 bagi guru kelas I dan IV di Sekolah Dasar Gugus Kaliyitno Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.